

Judul : Tindak tegas pejabat tidak netral
Tanggal : Kamis, 02 Nopember 2023
Surat Kabar : Media Indonesia
Halaman : 1

Tindak Tegas Pejabat tidak Netral

Menteri dan wakil menteri yang terlibat kemenangan capres-cawapres semestinya mengundurkan diri.

SRI UTAMI
ami@mediaindonesia.com

IMBAUAN Presiden Joko Widodo kepada pejabat negara agar menjaga netralitas nyatanya cuma sekadar pernyataan normatif tanpa taji. Yang mengental di lapangan justru fakta-fakta yang memperlihatkan ketidaknetralan sejumlah pejabat pemerintah dan pemantu Presiden.

Beberapa waktu lalu, Wakil Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Paiman Raharjo, tertangkap video sedang berorasi untuk memenangkan pasangan Prabowo Subianto Gibran Rakabuming. Meski ia mengaku saat itu tidak dalam kapasitasnya sebagai wakil menteri, tetap

saja ajakan itu dinilai tak etis karena jabatan publiknya tetap melekat.

Sebelumnya, Wakil Menteri ATR/BPN Raja Juli Antoni membuat postingan terkait kunjungan dinas ke Kupang, Nusa Tenggara Timur di akun X. Yang menjadi soal, pada postingan itu ia menyertakan *hashtag* Prabowo-Gibran.

Tim Pemenangan Nasional Ganjar Pranowo-Mahfud MD, Todung Mulya Lubis, menyebut semua itu mengindikasikan ketidaknetralan yang sangat terbuka dilakukan para pejabat pemerintah. Perilaku tersebut, menurutnya, mencederai integritas pemilu. "Termasuk pencopotan baliho (Ganjar-Mahfud) di Bali, semua merusak integritas pemilu," jelasnya, kemarin.

Todung menekankan tindakan seperti itu tidak boleh di biarkan pemerintah karena akan menimbulkan situasi yang tidak sehat dalam kontestasi politik. Dia mengkhawatirkan adanya regulasi dan tindakan yang bersifat *abuse of power*.

"Saya mengimbau semua pejabat pemerintah betul-betul tegak lurus pada prinsip tindakan yang melanggar asas netralitas. Presiden harus menindak mereka yang melanggar asas netralitas," tegasnya.

Senada, Direktur Lingkaran Madani (LJMA) Ray Rangkuti menyatakan para menteri dan wakil menteri yang terlibat kemenangan capres sebaiknya mengundurkan diri. Pengunduran diri itu penting untuk menjaga komitmen pemerintah bersikap netral dalam Pemilu 2024. "Lebih khusus bagi menteri yang merupakan calon presiden atau wakil presiden,"

tegasnya.

Ray juga mempertanyakan netralitas Jokowi yang masih kerap bertemu atau memobilisasi relawan. Terakhir, diberitakan Presiden menyambangi relawan pendukungnya yang tergabung dalam Arus Bawah Jokowi di sela-sela kunjungan kerja di Bali, Selasa (31/10).

Menurut Ray, kunjungan Presiden ke Bali merupakan kunjungan resmi kenegaraan. Semestinya semua kegiatan yang tidak berhubungan langsung dengan aktivitas kenegaraan tidak dilakukan. "Demi alasan apa pun pertemuan Jokowi dengan relawan di Bali itu tidak dapat dibenarkan."

"Mengapa? Di dalamnya pasti ada pembicaraan soal politik nasional, sementara saat ini Jokowi berhubungan langsung secara emosional dengan perhelatan ini dengan majunya Gibran sebagai cawapres," tambahnya.

Klarifikasi baliho

Terkait dengan ramainya pemberitaan tentang pencopotan baliho Ganjar-Mahfud di beberapa titik yang akan dilewati Presiden Jokowi saat kunjungan kerja di Bali, Pj Gubernur Bali Sang Made Mahendra Jaya mengklarifikasi bahwa langkah itu diambil semata untuk menjaga estetika.

"Yang dilakukan ialah menggeser sementara alat sosialisasi berupa baliho tersebut agar estetika terjaga," ujar Mahendra.

Di sisi lain, Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto mengingatkan saat ini rakyat sangat cerdas dan menjadi instrumen penting untuk memastikan pemilu berjalan adil, demokratis, tanpa *abuse of power*. "Penurunan baliho PDIP secara sepihak lalu muncul atribut secara masif dari partai lain, tentu menimbulkan kecurigaan publik," ujarnya. (Ykb/Ant/X-3)